

**OPTIMIZATION OF INITIATIVE RIGHTS FOR THE ESTABLISHMENT
OF REGIONAL REGULATIONS BY THE REGIONAL HOUSE OF
REPRESENTATIVES IN DHARMASRAYA DISTRICT**

Aandri Saputra¹ Darmini Roza² Maiyestati¹

**Bung Hatta University Postgraduate Program
E-mail: Aandrisaputra@gmail.com**

ABSTRACT

Optimizing the formation of regional regulations through the right of initiative by the DPRD Dharmasraya Regency is the result of the work achieved by members of the Dharmasraya Regency DPRD in carrying out their functions. In this study, it focuses on the formation of regional regulations through the initiative rights of the Dharmasraya Regency DPRD. The research method used is sociological juridical. The results show that the Dharmasraya Regency DPRD has not been optimal in the formation of regional regulations, this is evidenced by the number of regional regulations originating from the initiative of the DPRD in the last three years of 5 (five) regional regulations, far less than the regional regulations proposed by the Regent Executive as many as 48 (forty eight) regional regulations for the last three years.

Keywords: Optimization, Regional Regulations, Initiative Rights, DPRD.

**OPTIMALISASI HAK INISIATIF PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA.**

Aandri Saputra¹ Darmini Roza² Maiyestati¹

**Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta
E-mail : Aandrisaputra@gmail.com**

ABSTRAK

Optimalisasi pembentukan peraturan daerah melalui hak inisiatif oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil kerja yang dicapai oleh anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pembentukan peraturan daerah melalui hak inisiatif DPRD Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Dharmasraya belum optimal dalam pembentukan peraturan daerah, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah peraturan daerah yang berasal dari insiatif DPRD tiga tahun terakhir sebanyak 5 (lima) peraturan daerah, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peraturan daerah yang di usulkan oleh Bupati/Eksekutif sebanyak 48 (empat puluh delapan) peraturan daerah untuk tiga tahun terakhir. Hal itu disebabkan karena adanya kendala-kendala berupa kendala internal (Kurangya kemampuan drafting, Latar belakang keilmuan dan dan kendala eksternal (kurangnya komunikasi politik, tidak jadinya perda ditetapkan.) Upaya-upaya yang dilakukan berupa bimbingan teknis Legal drafting bagi anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, menghadirkan tenaga ahli dan meningkatkan komunikasi politik.

Kata Kunci : Optimalisasi, Peraturan Daerah, Hak Inisiatif, DPRD.